

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas di Indonesia masih marak terjadi, semakin maju perkembangan zaman semakin berpacu seseorang untuk mengikuti segala model kehidupan, dimana mereka menghalalkan segala cara guna mendapat apa yang diinginkan walaupun dengan cara yang tidak baik. Banyak dari tindakan ini didasarkan pada diri sendiri maupun atas dorongan dari orang lain. Sudah tidak asing lagi, kejahatan yang terjadi didasarkan pada kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat itu sendiri.

Faktor ekonomi menjadi salah satu tumpuan kejahatan seseorang, dan pelaku biasanya adalah orang yang berpenghasilan rendah, dan statusnya menganggur atau miskin, sehingga penghasilannya dianggap pas – pasan atau tidak mencukupi. Pada saat yang sama, kebutuhan keluarga semakin meningkat setiap harinya, dan jumlah anggota tidak sedikit. Kondisi ini memaksa sedikit orang yang memiliki keterampilan dan pendidikan untuk melakukan berbagai hal untuk menghasilkan menambah pendapatan. Oleh karena itu, cara seperti ini adalah satu – satunya cara untuk menghasilkan menambah pendapatan dengan melakukan kejahatan penipuan, pencurian dan perampokan dan hal sebagainya yang dapat merusak properti atau bisa membunuh juga.

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah tindak kejahatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Kota Pontianak memiliki jumlah kejahatan tertinggi di antara Kabupaten/Kota lainnya yang dilaporkan oleh Polda Kalimantan Barat. Meskipun angka tersebut menurun pada tahun 2020 (dari 2.522 kasus menjadi 953 kasus). Tetapi tidak merubah posisi Kota Pontianak sebagai urutan tertinggi dalam jumlah kejahatan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 1.1
Jumlah Tindak Kejahatan (Crime Total) Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat Tahun 2017 – 2021 (Dalam Kasus)

NO	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pontianak	2.522	2.358	1.743	953	967
2	Mempawah	252	170	165	255	173
3	Singkawang	265	292	177	181	173
4	Sambas	277	271	273	210	200
5	Sanggau	171	197	196	204	188
6	Sintang	165	175	167	153	114
7	Kapuas Hulu	106	97	75	57	35
8	Ketapang	417	514	355	326	374
9	Landak	144	138	100	108	129
10	Bengkayang	124	163	103	71	99
11	Sekadau	75	56	48	32	66
12	Melawi	134	94	67	44	55
13	Kayong Utara	37	51	57	43	57

Sumber : Polda Kalimantan Barat

Teori – teori tentang akar penyebab kejahatan (*The Causes Of Crime*) sangat luas, bervariasi dan terus berkembang, bisa bersifat umum tetapi bisa pula bersifat khusus. Secara umum, kejahatan bisa dikaji atas dasar teori biologis yang berkaitan dengan aspek fisik seperti aspek genetik, faktor evolusi pertumbuhan, struktur otak, peranhormonal yang mempengaruhi perilaku. Teori perkembangan kehidupan kemanusiaan (*Development Life Course*) yang mengkaji sejauh mana terjadi interaksi antara individu dan aspek sosial yang mempengaruhi perilaku jahat. Teori ekonomi yang menekankan pada “*Cost And Benefit Analysis*” perilaku kejahatan (*incentives*), dalam usaha mencegah dan mengatasi berbagai aspek penyebab kejahatan tersebut.

Tabel 1.2
Jumlah Jenis Kejahatan Berdasarkan Kejahatan Umum Yang Dipengaruhi Ekonomi Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat Tahun 2017 – 2021 (Dalam Kasus)

NO	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pencurian	2.328	2.423	1.826	1.268	1.379
2	Pemerasan	16	4	10	7	4
3	Penggelapan	441	416	246	226	259
4	Penipuan	209	179	121	126	141
5	Penipuan dan Penggelapan	25	39	23	26	35
6	Percobaan pencurian	9	16	9	8	7

Sumber : Polda Kalimantan Barat

Tabel 1.2 memperlihatkan jenis – jenis kejahatan umum yang di pengaruhi oleh ekonomi yaitu, pengangguran dan kemiskinan dan non ekonomi yaitu pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Tindak kejahatan pencurian paling tertinggi diantara tindak kejahatan lainnya. Pada tahun 2018 tindak kejahatan memiliki kasus sebesar 2.423 kasus dan pada tahun 2020 menurun sebesar 1.268 kasus. Sedangkan tindak kejahatan pemerasan, dan percobaan pencurian memiliki kasus terendah selama 5 tahun terakhir berkisar 1 – 20 kasus.

Tabel 1.3
Jumlah Jenis Kejahatan Berdasarkan Kejahatan Umum Yang Dipengaruhi Non Ekonomi Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat Tahun 2017 – 2021 (Dalam Kasus)

NO	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Permainan Judi	219	285	219	154	200
2	Perkosaan	13	10	14	11	18
3	Perbuatan Cabul	110	64	78	119	70
4	Penculikan	2	1	2	2	2
5	Pembunuhan	13	28	17	26	19
6	Kekerasan dalam Rumah Tangga	175	139	91	75	65
7	Menelantarkan (Keluarga)	1	6	1	3	3
8	Percobaan perkosaan	4	3	2	1	3
9	Miras tanpa izin	60	100	75	57	58
10	Penyalahgunaan sajam	28	33	34	33	31
11	Setubuh anak dibawah umur	76	56	41	48	52

Sumber : Polda Kalimantan Barat

Tabel 1.3 memperlihatkan jenis – jenis kejahatan umum yang di pengaruhi oleh Non ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Tindak kejahatan permainan judi paling tertinggi diantara tindak kejahatan lainnya. Pada tahun 2018 tindak kejahatan memiliki kasus sebesar 285 kasus dan pada tahun 2020 menurun sebesar 154 kasus. Sedangkan tindak kejahatan penculikan, menelantarkan keluarga, dan percobaan perkosaan memiliki kasus terendah selama 5 tahun terakhir berkisar 1 – 6 kasus.

Pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan yang termasuk seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan utama meningkatkan

kesejahteraan bagi seluruh warga bangsa. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan sangat strategis dan merupakan indikator utama karena bisa menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Pendidikan bahkan dijadikan sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat seperti bisa memperoleh posisi kerja yang baik, efisiensi produksi, dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat menambahkan pendapatan seseorang apabila bisa menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi daripada dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya. Karena tanpa pendidikan, masyarakat akan cenderung kesulitan dalam melawan masalah pada masa depan dunia secara menglobal.

Pendidikan dalam penelitian ini di ukur dari rata – rata lama sekolah. Rata – rata lama sekolah (RLS) menunjukkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di setiap daerah. Semakin tinggi nilai rata – rata lama sekolah, semakin tinggi tingkat pendidikan yang akan diperoleh. Rata – rata lama sekolah adalah rata – rata penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal yang diikuti.

Tabel 1.4
Rata – Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat
Tahun 2017 – 2021 (Dalam Tahun)

NO	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kota Pontianak	9,79	9,90	10,14	10,17	10,43
2	Mempawah	6,47	6,63	6,82	7,03	7,04
3	Kota Singkawang	7,3	7,57	7,72	7,89	7,90
4	Sambas	6,67	6,68	6,70	6,71	6,72
5	Sanggau	6,93	6,94	6,95	7,15	7,39
6	Sintang	6,72	6,73	6,89	7,07	7,08
7	Kapuas Hulu	7,02	7,25	7,47	7,52	7,53
8	Ketapang	7,03	7,04	7,04	7,31	7,46
9	Landak	7,08	7,09	7,10	7,11	7,12
10	Bengkayang	6,09	6,27	6,53	6,76	6,80
11	Sekadau	6,57	6,58	6,60	6,83	6,85
12	Melawi	6,53	6,66	6,67	6,76	6,91
13	Kayong Utara	5,85	5,86	6,00	6,01	6,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Tabel 1.4 memperlihatkan rata – rata lama sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat terus meningkat setiap tahunnya. Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat rata – rata lama sekolah penduduknya masih jauh dari nilai maksimum yaitu 15 tahun yang berkisar 6,02 tahun (Kabupaten Kayong Utara) hingga 10,43 tahun (Kota Pontianak). Hal ini menunjukkan bahwa masih beberapa terdapat daerah yang belum memenuhi target pendidikan minimal Sekolah Dasar, karena pembangunan sarana pendidikan diarahkan ke perkotaan dan terbatas pada pedesaan. Target pemerintah untuk wajib belajar 12 tahun belum tercapai, dan bila target ini tercapai angka rata – rata lama sekolah akan meningkat maka angka kejahatan semakin menurun.

Selain pendidikan, pengangguran adalah salah satu faktor yang mempengaruhi angka kriminalitas, karena pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, atau seseorang yang lagi mengusahakan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Pengangguran adalah orang – orang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan yang mereka butuhkan sesuai dengan tingkat upah tertentu, tetapi tidak bisa memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Secara umum, pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan yang tidak proposional dalam jumlah pekerjaan atau kesempatan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja atau jumlah pencari kerja. Ketimpangan ini berdampak pada kondisi ekonomi dan kehidupan sosial yang berujung pada ketidakstabilan politik dan sosial.

Tingkat pengangguran terbuka adalah jumlah orang yang menganggur sebagai persentase dari total angkatan kerja, yang membantu menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja termasuk dalam pengangguran. Tingginya angka pengangguran menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja.

Tabel 1.5 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat periode 2017 sampai dengan 2021 dalam persentase mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

menunjukkan Kabupaten Sambas mengalami penurunan walaupun berfluktuasi. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran Kabupaten Sambas sebesar 4,24% dan menunjukkan penurunan paling rendah pada tahun 2018 sebesar 3,30%. Pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 3,97% tetapi tidak terlalu besar dan masih rendah dibandingkan di tahun 2017.

Tabel 1.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Tahun 2017 – 2021 (Dalam Persen)

NO	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kota Pontianak	9,36	10,21	9,06	12,36	12,38
2	Mempawah	6,72	6,79	5,11	7,55	7,71
3	Kota Singkawang	8,08	7,75	6,31	8,78	9,16
4	Sambas	4,24	3,30	3,48	3,71	3,97
5	Sanggau	3,27	2,42	3,00	3,52	3,45
6	Sintang	1,93	2,28	3,10	4,50	3,95
7	Kapuas Hulu	2,21	1,54	2,43	4,02	4,18
8	Ketapang	3,97	3,17	4,39	7,30	6,94
9	Landak	2,03	2,23	2,69	3,38	3,22
10	Bengkayang	2,40	2,36	2,66	3,91	4,42
11	Sekadau	0,64	2,75	3,04	3,39	2,92
12	Melawi	2,11	3,05	2,39	2,70	2,66
13	Kayong Utara	5,00	3,86	3,89	3,71	3,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Menurut Ananta (2013), seseorang yang tidak bekerja atau kehilangan pendapatan menimbulkan masalah kejahatan, dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari sehingga menimbulkan tindakan kriminal. Ada hubungan yang sangat erat antara kejahatan dan pengangguran. Dengan demikian, upaya mengatasi pengangguran secara tidak langsung berdampak pada penurunan angka kriminalitas.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan diyakini adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus dihadapi Indonesia dan dunia. Di masa lampau kemiskinan pada umumnya bukan tentang orang – orang yang sulit

mendapatkan makanan, tetapi tentang orang – orang yang sulit mendapatkan kenyamanan materi. Masalah kemiskinan sebagai gambaran kekurangan materi, kebutuhan sosial, keterasingan sosial, ketergantungan, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, serta kekurangan dan ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan.

Tabel 1.6
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Kalimantan Barat
Tahun 2017 – 2021 (Dalam Persen)

NO	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kota Pontianak	5,31	5,00	4,88	4,70	4,58
2	Mempawah	5,94	5,61	5,32	4,95	5,18
3	Kota Singkawang	5,42	5,12	4,91	4,53	4,83
4	Sambas	8,59	8,55	8,19	7,70	7,66
5	Sanggau	4,52	4,67	4,57	4,46	4,55
6	Sintang	10,2	10,35	9,65	9,27	9,28
7	Kapuas Hulu	9,45	9,60	9,62	8,99	8,93
8	Ketapang	11,02	10,93	10,54	10,29	10,13
9	Landak	12,23	11,77	11,47	11,12	10,99
10	Bengkayang	7,51	7,17	6,96	6,62	6,48
11	Sekadau	6,46	6,17	6,11	5,87	6,26
12	Melawi	12,54	12,83	12,38	12,04	12,01
13	Kayong Utara	9,89	10,08	9,98	9,56	9,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Tabel 1.6 menjelaskan bahwa persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat berbeda – beda disetiap wilayah kabupaten ataupun kota. Terlihat di atas, bahwa Kabupaten Melawi menjadi Kabupaten yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi sebesar 12% an disetiap tahunnya. Pada tahun 2018 persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Melawi sebesar 12,83% dan menunjukkan penurunan di tahun 2021 sebesar 12,01%. Sementara untuk Kabupaten Sanggau menjadikan daerah tersebut dapat menekankan angka kemiskinan disetiap tahunnya berada disekitar 4% an. Kabupaten Sanggau juga yang memiliki persentasenya paling rendah yaitu pada tahun 2017 sebesar 4,52% .

Kemiskinan dapat berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat. Memang keterkaitan dalam mata rantai kemiskinan dapat memicu dan menimbulkan masalah lain seperti kelaparan, pengangguran, kebodohan, tindak kriminal (pencurian, pembobolan, pembunuhan, pencopetan dan masalah lainnya). Maka untuk mengatasi masalah tersebut, banyak orang yang menanganinya dengan cara yang menyimpang dari norma yang berlaku, yaitu melalui tindakan kriminal.

Dari penjelasan latar belakang diatas menunjukkan adanya indikasi hubungan antara Pendidikan, Pengangguran dan Kemiskinan. Sehingga penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Rata – Rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Akibat Adanya Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Tindak kejahatan merupakan masalah yang semakin kompleks yang terjadi pada semua lapisan masyarakat Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan barat. Tindak kejahatan itu sendiri masih banyak dilakukan oleh anak – anak dari SD hingga SMA, selain itu faktor penyebab lainnya disebabkan oleh kemiskinan dan pengangguran.

1.2.2 Pernyataan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah rata – rata lama sekolah berpengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ?
2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ?
3. Apakah rata – rata lama sekolah berpengaruh terhadap kriminalitas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ?
4. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kriminalitas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ?

5. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap kriminalitas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ?
6. Apakah rata – rata lama sekolah dan pengangguran berpengaruh terhadap kriminalitas akibat adanya variabel kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh rata – rata lama sekolah terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh rata – rata lama sekolah terhadap kriminalitas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kriminalitas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap kriminalitas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Untuk mengetahui pengaruh rata – rata lama sekolah dan pengangguran terhadap kriminalitas akibat adanya variabel kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah bahan referensi bagi mahasiswa lain yang sedang menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan variabel – variabel dalam penelitian ini.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Temuan penelitian ini berkontribusi bagi :

1. Peneliti

Yaitu sebagai penerapan ilmu mahasiswa bidang ekonomi pembangunan yang telah diperoleh dan dipelajari selama mengikuti perkuliahan di Universitas Tanjungpura (UNTAN).

2. Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penulisan ini akan memberikan sumbangan pemikiran, serta dapat memberikan informasi bagi pemerintah mengenai pengaruh ekonomi terhadap tindak kejahatan khususnya di Kota Pontianak.

3. Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat berupa tambahan literatur dan referensi empiris tentang mengenai pengaruh rata – rata lama sekolah, dan pengangguran terhadap kriminalitas akibat variabel kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.